

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang dilaksanakan oleh masyarakat baik merupakan kegiatan fisik maupun kegiatan ekonomis produktif berbasis peran musyawarah desa dalam pengembangan kecamatan yang menitikberatkan pada partisipasi masyarakat sebagai pendekatan operasional dalam peningkatan kapasitas, kelembagaan, serta perluasan pilihan masyarakat dalam memberikan swadaya terhadap bantuan Program Pengembangan Kecamatan yang memerlukan imbalan swadaya baik berupa tenaga, material maupun modal.

Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara secara mendalam secara langsung maupun dengan cara menyampaikan daftar pertanyaan kepada responden, ketua kelompok masyarakat, pamong desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)= 70 personel. Personel meliputi Lurah Desa 7 orang, Kepala Dukuh 7 orang, Rukun Tetangga (RT) 7 orang, Rukun Warga (RW) 7 orang, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) 7 orang dan tokoh masyarakat anggota kelompok masyarakat pemanfaat 35 orang. Serta pemeriksaan keabsahan data dengan triangulasi data, yaitu sebagai *crosscheck* data yang telah disampaikan responden.

Partisipasi masyarakat ikut serta secara aktif dalam setiap pengambilan keputusan masyarakat salah satu wujud nyata dimana setiap tahapan kegiatan Program Pengembangan Kecamatan mulai dari sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengembangan melalui forum musyawarah dusun, musyawarah desa, musyawarah antar desa dapat hadir dan dilaksanakan dengan baik.

Partisipasi adalah mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Partisipasi bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Dalam rangka mengantisipasi berbagai isu yang ada, pemerintah menyediakan saluran komunikasi agar masyarakat dapat mengutarakan pendapatnya melalui musyawarah dusun, desa maupun musyawarah antar desa (MAD). Bentuk lain untuk merangsang keterlibatan masyarakat adalah melalui perencanaan partisipatif untuk menyiapkan agenda pembangunan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan secara partisipatif. Dan mekanisme konsultasi untuk menyelesaikan isu sektoral.

Partisipasi masyarakat kecuali berbentuk keterlibatannya dalam pengambilan keputusan terhadap bantuan Program Pengembangan Kecamatan dimana pemerintah sebagai fasilitatornya berkewajiban menyediakan modal bagi kelompok masyarakat menurut kegiatan yang diusulkan, dilakukan penilaian oleh tim verifikasi, adalah kelompok masyarakat yang memenuhi persyaratan bantuan Program Pengembangan Kecamatan, meliputi kelompok masyarakat yang telah berdiri paling tidak 1 (satu) tahun, memiliki administrasi, dan ada dukungan swadaya masyarakat. Hasil penelitian menggambarkan bahwa bentuk swadaya masyarakat berupa: tenaga, material, dan uang. Akan tetapi juga menurut kriteria tersebut diatas tidak dapat melibatkan orang miskin secara keseluruhan.

Pemerintah dalam upaya menanggulangi kemiskinan melalui bantuan Program Pengembangan Kecamatan merupakan tindak lanjut dari Inpres nomor 5 tahun 1993 tentang Desa Tertinggal yang merupakan dana hibah untuk kegiatan usaha ekonomis produktif dengan bentuk simpan pinjam usaha peternakan dan usaha perdagangan bagi kelompok masyarakat miskin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran musyawarah desa dalam pengembangan demokrasi yang dilakukan masyarakat menjadi penting keterlibatannya dalam pengambilan keputusan perputaran dan kelestarian dana. Hal ini pelaksanaannya mirip dengan bantuan Program Pengembangan Kecamatan, masing-masing dibentuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dibentuk Badan Pengawas dan dibentuk Pengurus.

Kata-kata Kunci : Partisipasi, Program Pengembangan Kecamatan, Musyawarah Desa

ABSTRACT

This research is aimed to know how The Program Pengembangan Kecamatan (PPK) or The Sub District Development Program done by the society including physical and productive economic activities based on rural formal discussion towards sub district development. This program use people's participation as an operational approach in capacities development, organization and wider community's choices when giving their contribution to this program. For example: their power, materials and modals.

This research use qualitative descriptive approach method. To collect the data, this research using an observation technique, direct and indirect reportations. Observation technique use an essay to its respondents, community leaders, rural officers, rural society empowering organization members or Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD). All of them are 70 men. They are rural leaders 7 men, sub rural leaders 7 men, rukun Tetangga (RT) 7 men, Rukun Warga (RW) 7 men, rural society empowering organization members 7 men, and society group members 35 men. Then the data's checking use data Triangulation as a crosscheck toward data which are received from the respondents.

The social participation in taking decision is a fact that The Sub District Development Program's step. Which are consist of socialization, planning, implementation, controlling and developing using sub rural formal, rural formal or rural to rural formal discussion, done well.

Participation means suggesting every people to use their rights in giving their opinion, or idea, at the formal discussion to take a community decision for the community's own society business directly or indirectly.

Participation aimed to guarantee that every decision created in every formal discussion, expressing its community's own aspirations. In order to anticipating every existing issues, government give the communication line. So, every people will be able to express their own idea in sub rural formal discussion, rural formal discussions, or rural to rural formal discussions. Another form to stimulating the participation of the society is to use participative planning for creating development agenda, eyeing, evaluating, participative controlling and consultation mechanism to get rid of sectoral issues.

Social participation except means as an involvement in decision making towards The Sub District Development Program where the government act as a facilitator has a duty to give a modal to the social organizations for every selected activities proposed. This activity proposals, before agreed by the government, are observed by verification team. Where are the points should become a close attentions are the society which are 1 (one) year minimum exist, has an administrative system, and the amount of its society contribution for activity being proposed. The result of research shows that the society contributions are power, materials and moneys. But including this criteria do not always involving the poor people totally.

The government, in their effort to eliminating poor condition of its own societies, use this The Sub District Development Program to continuing the President's Instruction (inpres) number 5, year 1993 about Inpres Desa Tertinggal (IDT) or President's Instruction for Poor Rural. Those are giving free money used to produce economic activities such as farming credit and saving and trading between poor people. The result of this research shows that the formal discussions contribution in developing democracy done by the society is become important, it's contribution in decision making in the money circulation and it's money revolving. This President's Instruction for Poor Rural program is not quite different with The Sub District Development Program, each of it creating basic and home financing, controlling the organization and team building.

Keywords: Participation, The Sub District Development Program, Rural Formal Discussion.